

## Determinan tata kelola pemerintahan pada OPD kabupaten Bima

Nadia Ersy Mithasarinama<sup>1</sup>, Biana Adha Inapty<sup>2</sup>, Nurabiah<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.24123/jati.v16i1.5227>

### **Abstract**

*This study aims to examine whether the regional financial accounting system, human resource competence, transparency and accountability of financial management have an effect on good governance. The approach used is quantitative data. This study's population is all OPD in Bima Regency with the sample criteria, namely employees who carry out accounting or financial administration functions. The sampling technique used was purposive sampling with a sample of 122 respondents. The results of this study indicate that regional financial accounting systems and financial management transparency have no effect on good governance, while human resource competency and financial management accountability have a positive effect on good governance. The implication of this research is that the Bima Regency Government can improve the competence of employees who work as financial managers by providing education and training related to good governance and placing appropriate apparatus in the field of regional financial management. The results of the research contribute to enriching knowledge regarding the application of Stewardship Theory. The government as the holder of the trust can carry out good governance. The financial accounting system must comply with predetermined standards so it can produce financial reports that can be accounted for, are relevant, reliable, comparative and verifiable.*

*Keywords: Accountability; Good Governance; Human Resource Competence; Regional Financial Accounting System; Transparency.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan yang digunakan adalah data kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh OPD di Kabupaten Bima dengan kriteria sampel, yaitu pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan. Teknik sampling yang digunakan, yaitu purposive sampling dengan hasil sampling sebanyak 122 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bima dapat meningkatkan kompetensi pegawai yang bekerja sebagai pengelola keuangan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan menempatkan aparatur yang tepat pada bidang pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian memberi kontribusi dengan memperkaya pengetahuan mengenai penerapan Stewardship Theory. Pemerintah sebagai pemegang amanah dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem akuntansi keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, relevan, andal, komparatif, dan dapat diverifikasi.*

*Kata kunci: Akuntabilitas; Kompetensi Sumber Daya Manusia; Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; Transparansi.*

### **Riwayat artikel**

Artikel masuk : 12 September 2022  
Artikel direvisi : 8 Oktober 2022  
Artikel diterima : 20 November 2022

---

\*Email korespondensi: nurabiah@unram.ac.id

## PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi, seperti merombak pola sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi, termasuk perubahan pada sistem administrasi keuangan negara dengan ditetapkannya beberapa paket Undang-Undang Keuangan Negara (Nuradhawati, 2019). Dalam rangka mencapai *good government governance*, semua otoritas secara berkala melakukan inovasi dalam akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan yang baik.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, banyak laporan keuangan daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih terdapat kecurangan yang terjadi dalam pemerintahan, seperti korupsi dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Banyak kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang setelah mendapat WTP merasa itu sudah cukup, padahal opini WTP bukanlah tujuan akhir. Jika laporan keuangan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah meraih opini WTP, mereka harus mengevaluasi kembali catatan-catatan dari BPK yang bisa dimaksimalkan untuk efisiensi anggaran. Evaluasi ini bisa mengacu pada aspek perencanaan kegiatan hingga pengambilan keputusan terutama dalam laporan keuangan harus dipakai sebagai alat untuk *feed back* membuat perencanaan yang lebih baik (Putera, 2018).

Pemerintah Kabupaten Bima memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 untuk yang keenam kalinya sejak tahun 2015 (BPK RI 2020). Hal ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bima. Akan tetapi, masih ada kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bima. Kasus tersebut menyeret nama seorang anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi Gerindra yang diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan anggaran Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Karoko Mas dan Yayasan Al-Madinah miliknya. Hal ini telah dilaporkan lebih dari satu pelapor di Polres Bima Kota pada Oktober 2019. Lamanya proses dalam kasus ini disebabkan oleh pihak kepolisian banyak menemukan saksi baru dan LPJ PKBM Karoko Mas. Dalam laporan tersebut, seorang anggota DPRD diduga kuat menyimpang dan menyelewengkan dana PKBM senilai Rp1,080 miliar pada tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan berbagai program kegiatan yang di dalamnya melalui bantuan APBN.

Faktor-faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yaitu, peran auditor internal, sistem pengendalian



internal, standar akuntansi pemerintahan, temuan audit, pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Namun, penelitian ini menggunakan empat faktor, yaitu variabel sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Faktor pertama yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian Haeli (2020); Sari & Tamrin (2014); Yusniyar et al. (2016) menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Faktor kedua adalah kompetensi sumber daya manusia. Sebuah tata kelola pemerintahan yang baik perlu ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari sumber daya manusia yang bersangkutan. Aparatur daerah yang kompeten sangat berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ardiyanti & Supriadi (2018) dan Limbong et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Faktor ketiga adalah transparansi. Organisasi pemerintah hendaknya mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta dapat diperbandingkan dan dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan keuangan. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ardiyanti & Supriadi (2018) yang menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Faktor keempat adalah akuntabilitas. Pertanggungjawaban tersebut ada kalanya berbentuk sebagai akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Penelitian ini memiliki empat tujuan. Pertama, menganalisis dampak sistem akuntansi keuangan daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, menganalisis kompetensi sumber daya manusia terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, menganalisis transparansi pengelolaan keuangan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Terakhir, menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian ini penting dilakukan karena menyoroti berbagai hal penyebab tidak tercapainya tata kelola pemerintah yang baik. Berbagai penelitian tentang tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) sudah banyak dilakukan di berbagai wilayah Indonesia (Haeli, 2020; Hildan, 2015; Kurniasari, 2016; Lestari, 2020; Limbong et al., 2019; Pertiwi, 2016; Pujanira & Taman, 2017; Sari & Tamrin, 2014; Setiowati et al., 2017;

Syarion et al., 2015; Yusniyar et al., 2016). Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada OPD Kabupaten Bima, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada OPD Kabupaten Wonogiri yang mungkin memiliki perbedaan karakteristik organisasi. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam memperkaya pengetahuan dan pemahaman pada penerapan *Stewardship Theory*. Pemerintah sebagai pemegang amanah dapat menjamin pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem akuntansi keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang relevan, andal, komparatif, dan dapat diverifikasi.

## TELAAH TEORETIS

### *Stewardship Theory*

*Stewardship theory* menekankan pada adanya hubungan yang kuat dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Utilitas yang maksimal dari pihak *principal* dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut sehingga *stewardship theory* menekankan pada tindakan seorang manajer yang mengutamakan kepentingan *principal* atau organisasi di atas kepentingan pribadi. Manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik demi tercapainya tujuan organisasi (Arifin et al., 2016). *Stewardship theory* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik (Herawati et al., 2016). Oleh karena itu, pemerintah daerah yang baik akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mencapai pemerintahan yang baik.

### *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan*

Pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntan pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Haeli (2020); Sari & Tamrin (2014); Yusniyar et al. (2016) yang menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil sebagai berikut.



**H<sub>1</sub>: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan.**

***Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan***

Suatu sistem tanpa ditunjang kualitas sumber daya manusia (pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari sumber daya manusia yang bersangkutan). Aparatur daerah yang kompeten sangat berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ardiyanti & Supriadi (2018) dan Limbong et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil, yaitu:

**H<sub>2</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan.**

***Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan***

Organisasi pemerintah hendaknya mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ardiyanti & Supriadi (2018) yang menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil, yaitu:

**H<sub>3</sub>: Transparansi berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan.**

***Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan***

Akuntabilitas berbentuk sebagai akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan salah satu cara untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Ardiyanti & Supriadi (2018) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil, yaitu:

**H<sub>4</sub>: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan.**

**METODE**

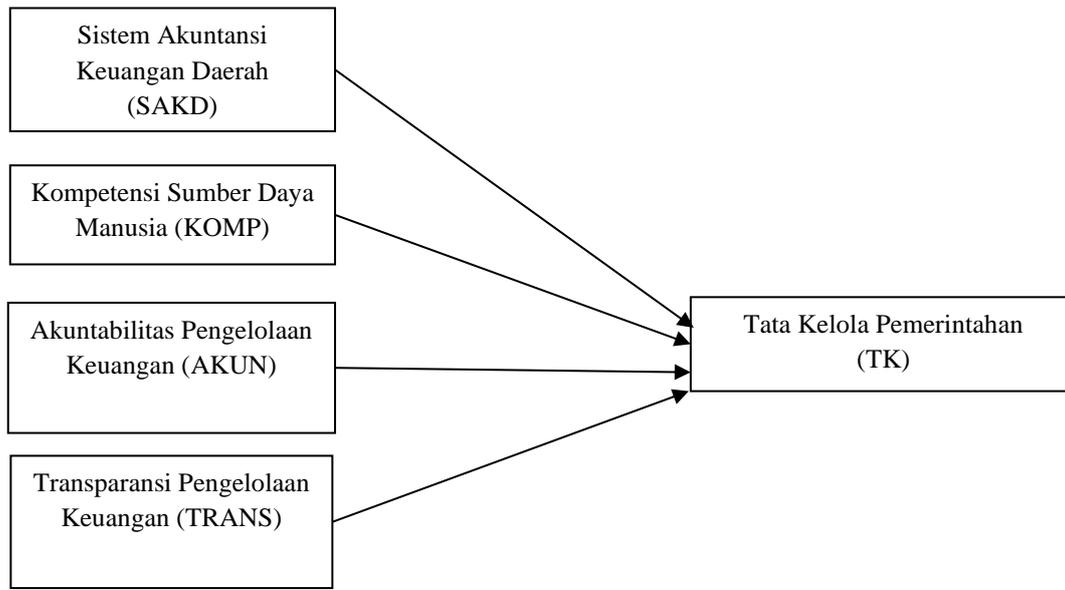
Studi ini merupakan penelitian asosiatif kuantitatif yang dilakukan pada 43 Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Bima. Penarikan sampel dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria aparatur yang menjalankan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan. Responden berjumlah 159 orang yang terdiri dari kepala sub bagian keuangan, staf keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Jenis data merupakan data primer dan sumber pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan pengolahan data



menggunakan *Smart PLS* dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$TK = \alpha + \beta_1SAKD + \beta_2KOMP + \beta_3AKUN + \beta_4TRANS + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

TK adalah tata kelola pemerintahan yang baik sebagai variabel dependen dan variabel yang lain sebagai variabel independen yaitu SIAKD sebagai sistem akuntansi keuangan daerah, KOMP sebagai kompetensi sumber daya manusia, AKUN sebagai akuntabilitas pengelola keuangan dan TRANS sebagai transparansi pengelolaan keuangan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Uji Reliabilitas*

Uji reliabilitas sudah memenuhi syarat dengan nilai *cronbach's alpha* > 0,7 dan nilai *composite reliability* > 0,7. Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai *composite reliability* untuk semua konstruk > 0,7 sehingga dapat dikatakan konstruk yang digunakan dalam model penelitian sudah reliabel.

Tabel 1. Uji Reliabilitas

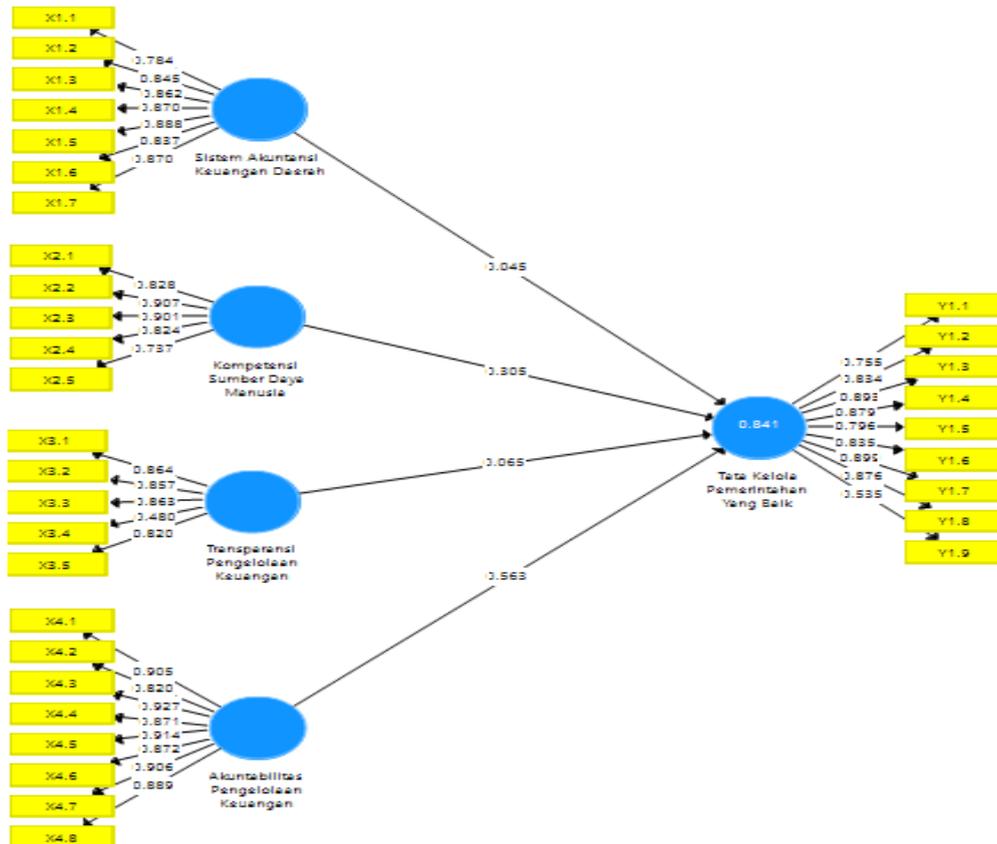
Konstruk	Composite Reliability
Tata kelola pemerintahan yang baik	0,9
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,9
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,9
Transparansi Pengelolaan Keuangan	0,9
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	0,9

Sumber: Data diolah, 2022



**Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah konstruk variabel sudah valid dan siap untuk diuji. Aturan untuk memenuhi tingkat validitasnya adalah *outer loading* > 0,7. Namun, menurut Ghazali et al. (2015), nilai *loading factor* 0,5-0,6 masih dianggap cukup. Penelitian ini sudah memenuhi tingkat *loading factor* di atas 0,5 dan yang tidak memenuhi syarat telah dieliminasi.



**Gambar 2. Model Struktural Sesudah Dieliminasi**  
**Sumber: Data diolah, 2022**

**Uji Hipotesis**

Berdasarkan Tabel 2, hipotesis variabel sistem informasi keuangan daerah dinyatakan ditolak karena *p value* > 0,05 atau nilai *t-statistik* lebih kecil dari *t tabelnya* (0,80 < 1,64). Hipotesis akuntabilitas pengelolaan keuangan juga ditolak karena nilai *p-value* > 0,05. Kompetensi sumber daya manusia dan transparansi pengelolaan keuangan diterima karena *p-value* < 0,05 atau nilai *t-statistik* lebih besar dari *t tabelnya* (3,30 > 1,64 dan 4,52 > 1,64).

**Tabel 2. Uji Hipotesis**

	<b>Total Sampel</b>	<b>t-stat</b>	<b>t-table</b>	<b>H</b>	<b>P-Values</b>	<b>Ket</b>
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah - Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	0,07	0,80	1,64	1	0,42	Ditolak
Kompetensi Sumber Daya Manusia - Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	0,30	3,30	1,64	2	0,00	Diterima
Transparansi Pengelolaan Keuangan - Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	0,05	0,90	1,64	3	0,36	Ditolak
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan - Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	0,54	4,52	1,64	4	0,00	Diterima

**Sumber: Data diolah, 2022**

### ***Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***

Hasil studi ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil ini dapat dilihat berdasarkan penyebaran kuesioner, yaitu sebesar 3,75% responden menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan, analisis atau identifikasi transaksi, dan pembuatan laporan keuangan secara konsisten dan periodik belum mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik secara optimal. Cukup banyak responden, yakni sebesar 4,33% yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah sudah cukup, tetapi sebaiknya ditingkatkan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil ini dipertegas dari hasil penyebaran kuesioner bahwa sebesar 8,08% responden menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan belum maksimal, padahal dalam mengelola keuangan sistem akuntansi keuangan daerah ini dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal tersebut didukung oleh jawaban responden dari masing-masing indikator sistem akuntansi keuangan daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dijelaskan dalam tujuh indikator. Pertama, indikator sistem akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belum diterapkan secara maksimal dan perlu ditingkatkan. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 9,8% responden yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan belum maksimal. Kedua, indikator setiap transaksi keuangan dianalisis, diidentifikasi, dan diklasifikasi belum dilakukan secara maksimal. Hal ini didukung dengan

penilaian responden sebesar 5,72% responden yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan dianalisis, diidentifikasi, dan diklasifikasi belum dilakukan secara maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Ketiga, indikator pengidentifikasian atas pencatatan belum dilakukan secara maksimal. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 7,38% responden yang menyatakan bahwa belum dilakukan pengidentifikasian atas pencatatan secara maksimal sehingga perlu ditingkatkan lagi.

Indikator keempat, setiap transaksi keuangan didukung oleh bukti transaksi belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 13,85% responden yang menyatakan bahwa setiap transaksi keuangan belum didukung oleh bukti transaksi. Kelima, indikator semua transaksi keuangan belum dilakukan pencatatan secara kronologis secara maksimal. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 7,38% responden yang menyatakan bahwa semua transaksi keuangan belum dilakukan pencatatan secara kronologis secara maksimal sehingga perlu ditingkatkan lagi. Keenam, indikator dilakukan klasifikasi atas transaksi ke dalam pos-pos yang semestinya belum dilakukan secara maksimal. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 7,38% responden yang menyatakan bahwa klasifikasi atas transaksi ke dalam pos-pos yang semestinya belum dilakukan secara maksimal sehingga perlu ditingkatkan lagi. Terakhir, indikator pembuatan laporan keuangan dilakukan belum secara konsisten dan periodik. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 4,92% responden yang menyatakan bahwa pembuatan laporan keuangan dilakukan belum secara konsisten dan periodik.

Selain didukung dari hasil analisis jawaban responden tersebut mengenai ketujuh indikator yang terdapat dalam variabel sistem akuntansi keuangan daerah, penelitian ini juga dapat didukung dari segi karakteristik responden. Pertama, berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa masih banyak pegawai yang tingkat pendidikannya SLTA/Sederajat. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan atau pemahaman terkait sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, berdasarkan jumlah kursus/pelatihan di bidang pengelolaan keuangan yang diikuti menunjukkan bahwa masih banyak responden yang tidak pernah mengikuti kursus/diklat/bimtek, yakni sebanyak 35,2%. Diklat terkait sistem akuntansi keuangan daerah sangat dibutuhkan agar para pegawai menjadi lebih mudah dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan keikutsertaan responden yang mengikuti diklat terkait sistem akuntansi keuangan daerah, keinginan responden mengikuti diklat masih rendah padahal diklat sangat dibutuhkan untuk memperbaharui ilmu serta menambah wawasan dan pemahaman terkait

sistem akuntansi keuangan daerah yang akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini berkontradiksi dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Astrawan et al. (2016) dan Vidyasari (2021) yang menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan, semakin baik pula tata kelola pemerintahan.

### ***Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***

Hasil studi ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompetensi sumber daya manusia terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin tinggi latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan sikap menghargai pekerjaan, kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Hal ini diperkuat oleh hasil penyebaran kuesioner tentang kompetensi sumber daya manusia sebesar 72,46% responden menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia sudah baik. Hal tersebut didukung oleh jawaban responden dari masing-masing indikator kompetensi sumber daya manusia terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator pertama, latar belakang dan tingkat pendidikan aparatur daerah sangat membantu dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan pokok dan fungsinya. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 71,31% yang menyatakan bahwa pegawai yang melaksanakan tugas atau pekerjaan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Indikator kedua, pengalaman pegawai dalam pekerjaan sebelumnya sangat membantu dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan saat ini. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 61,47% yang menyatakan bahwa pegawai yang bekerja sebagai pengelola keuangan memiliki pengalaman yang baik dalam membantu melaksanakan tugas dan pekerjaannya saat ini. Indikator ketiga, pengelola keuangan daerah telah mengetahui tugas pokok dan fungsinya, terutama terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 89,34% yang menyatakan bahwa pegawai sebagai pengelola keuangan daerah sudah mengetahui tugas pokok dan fungsinya dengan baik, terutama terkait laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Indikator keempat, pengelola keuangan daerah sudah mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan sehingga meningkatkan produktivitas organisasi. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 66,39% menyatakan bahwa pegawai sudah mengikuti kegiatan pengembangan SDM, seperti kursus atau seminar untuk meningkatkan keterampilannya. Indikator kelima, kompetensi



sumber daya manusia dalam hal ini pengukuran kinerja aparatur daerah telah sesuai dengan capaian pelaksanaan tugasnya. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 72,46% menyatakan bahwa pegawai sudah mencapai tingkat kinerja yang baik seperti disiplin yang diukur dari kehadiran atau absensi.

Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa indikator kompetensi sumber daya manusia dalam hal peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi indikator yang berpengaruh besar dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya, kelima indikator yang terdapat dalam kompetensi sumber daya manusia mampu meningkatkan kualitas SDM dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Selain didukung dari hasil analisis jawaban responden tersebut mengenai kelima indikator yang terdapat dalam variabel kompetensi sumber daya manusia, penelitian ini juga dapat didukung dari segi karakteristik responden. Jenis kelamin responden didominasi perempuan sebesar 71%. Hal ini disebabkan oleh perempuan lebih memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dibandingkan responden laki-laki pada penelitian ini sebesar 29%. Hal tersebut didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *YouGov* untuk *young woman trust's* yang mengungkapkan bahwa wanita lebih teliti dibandingkan pria (Karpowitz et al., 2017). Ketelitian dalam penelitian ini berarti wanita lebih teliti dalam hal pengelolaan keuangan daerah guna tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Mayoritas usia responden berada pada usia yang matang dengan tingkat emosi yang lebih stabil serta dewasa dan andal dalam menjalankan tugas, yaitu berusia 41-50 tahun. Persentase yang juga cukup tinggi pada responden yang berusia 31-40 tahun sebesar 33%. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja sebagai pengelola keuangan daerah memiliki usia yang matang dengan tingkat emosi yang lebih stabil, dewasa, serta handal sehingga mereka mampu membantu terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa yang mendominasi adalah responden dengan tingkat pendidikan S1, yaitu sebesar 69%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memberikan pengetahuan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga memberikan landasan untuk mengembangkan diri serta memberikan kemampuan untuk memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitarnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang tinggi, yaitu S1 mampu memudahkan untuk tercapainya tujuan organisasi yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan masa kerja atau lama kerja aparatur dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan, sebagian besar responden telah bekerja sebagai pengelola keuangan lebih dari sepuluh tahun. Hal tersebut menunjukkan dengan masa

kerja yang cukup lama sebagai pengelola keuangan daerah dan memberikan arti bahwa sebagian besar responden telah memiliki sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan keikutsertaan responden dalam mengikuti kursus atau pelatihan pengelolaan keuangan daerah, responden yang mengikuti diklat sebanyak satu kali sebesar 43,4% dan responden yang mengikuti dua kali, yakni sebesar 14%. Hal ini disebabkan oleh kesadaran akan pentingnya kursus atau pelatihan akuntansi (pengelolaan keuangan daerah) guna menambah ilmu serta wawasan dan memperbaharui ilmu pegawai dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil studi ini juga didukung oleh *stewardship theory* yang mengungkapkan kewajiban meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintahan. Pengelola keuangan harus dikelola secara profesional sehingga pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan kualitas SDM wajib dimiliki para pegawai demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiyanti & Supriadi (2018) dan Sanjaya et al. (2017) yang mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki SDM sebagai pengelola keuangan daerah maka tata kelola pemerintahan juga akan semakin baik.

### ***Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik***

Hasil studi ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara transparansi pengelolaan keuangan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan 31,64% responden menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan cukup diterapkan dengan baik, tetapi masih kurang optimal. Kemudahan akses laporan keuangan serta penyediaan informasi mengenai prosedur, biaya yang dikelola, dan mekanisme alur pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar perlu dioptimalkan. Hal ini disebabkan oleh masih banyak responden yang menjawab pada skala 3.

Hasil ini diperkuat oleh hasil penyebaran kuesioner tentang transparansi pengelolaan keuangan bahwa sebesar 28,85% responden menyatakan transparansi pengelolaan keuangan cukup diterapkan, padahal transparansi harus diterapkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh masyarakat luas memiliki hak untuk mengakses secara terbuka dan menyeluruh mengenai

informasi keuangan. Hal tersebut didukung oleh jawaban responden dari masing-masing indikator transparansi pengelolaan keuangan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama, indikator kemudahan akses laporan keuangan melalui media massa, surat kabar, dan internet cukup diterapkan, tetapi perlu ditingkatkan. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 35,24% responden yang menyatakan bahwa kemudahan akses laporan keuangan melalui media massa, surat kabar, dan internet belum maksimal diterapkan. Kedua, indikator penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur-prosedur cukup diterapkan, tetapi perlu ditingkatkan. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 7,38% yang menyatakan penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur-prosedur belum diterapkan secara maksimal.

Ketiga, indikator penyediaan informasi mengenai biaya-biaya yang dikelola cukup diterapkan, tetapi perlu ditingkatkan. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 13,11% yang menyatakan bahwa penyediaan informasi mengenai biaya-biaya yang dikelola sudah diterapkan, tetapi belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Keempat, indikator menyusun mekanisme alur pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar atau permintaan pihak tertentu untuk membayar uang suap hanya diterapkan di beberapa OPD saja. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 45,08% yang menyatakan bahwa mekanisme alur pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar atau permintaan pihak tertentu untuk membayar uang suap belum diterapkan secara menyeluruh. Kelima, indikator meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan belum dilakukan secara maksimal. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 43,44% yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan, tetapi belum maksimal.

Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan indikator transparansi pengelolaan keuangan dalam hal peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi indikator yang tidak berpengaruh besar dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya, kelima indikator yang terdapat dalam variabel transparansi pengelolaan keuangan belum mampu secara optimal mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan tingkat pendidikan, masih banyak pegawai yang tingkat pendidikannya SLTA/Sederajat. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan atau pemahaman terkait transparansi pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan keikutsertaan responden dalam mengikuti kursus/pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, masih banyak responden yang tidak pernah mengikuti kursus/diklat/bimtek, yakni sebanyak

35,2%. Diklat terkait transparansi pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan agar dalam mengelola keuangan daerah para pegawai menjadi lebih mudah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, berdasarkan keikutsertaan responden mengikuti diklat terkait transparansi pengelolaan keuangan, keinginan responden mengikuti diklat masih rendah padahal diklat sangat dibutuhkan untuk memperbaharui ilmu serta menambah wawasan dan pemahaman terkait transparansi pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian ini berkontradiksi dengan *stewardship theory* yang mengungkapkan pengelolaan keuangan daerah harus memiliki transparansi pengelolaan keuangan agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Akan tetapi, kenyataannya transparansi pengelolaan keuangan terkait tata kelola pemerintahan yang baik pada penelitian ini belum optimal dan perlu ditingkatkan agar para pegawai lebih mudah melaksanakan tugas dan fungsinya. Hasil penelitian ini berkontradiksi dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Bakhtiar (2021) dan Ardiana et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin tinggi transparansi pengelolaan keuangan, semakin baik pula tata kelola pemerintahan.

### ***Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dengan koefisien parameter 0,54 dan signifikan karena kedua variabel tersebut memiliki nilai t statistik di atas 1,49 sebesar 4,52 yang berarti ada pengaruh antara keduanya. Dengan demikian, hipotesis 4 yang menyatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik diterima.

Hal ini diperkuat oleh hasil penyebaran kuesioner tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 91,80% responden menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah baik. Pertama, indikator menyusun laporan keuangan sudah dilakukan dengan tepat waktu dan lengkap. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 92,62% yang menyatakan bahwa laporan keuangan sudah disusun dengan tepat waktu dan lengkap sehingga tidak menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Kedua, indikator laporan keuangan sudah bebas dari kesalahan material. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 84,42% yang menyatakan bahwa laporan

keuangan sudah bebas dari kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Ketiga, indikator laporan keuangan sudah disajikan secara andal dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 90,98% yang menyatakan bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara andal dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya sehingga dapat mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan secara relatif.

Keempat, indikator laporan keuangan sudah menyajikan informasi keuangan yang lengkap. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 92,62% yang menyatakan bahwa laporan keuangan sudah menyajikan informasi keuangan yang lengkap agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut. Kelima, indikator informasi laporan keuangan digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 92,62% yang menyatakan bahwa informasi laporan keuangan digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pemerintah daerah. Informasi laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* dan mencari tahu langkah yang akan diambil dalam jangka pendek maupun jangka panjang suatu OPD.

Keenam, indikator informasi laporan keuangan digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 90,98% yang menyatakan bahwa informasi laporan keuangan digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Ketujuh, indikator penyusunan laporan keuangan telah berdasarkan SAP. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 95,08% yang menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan telah berdasarkan SAP. Terakhir, indikator LKPD telah ditinjau oleh Inspektorat dan diaudit oleh BPK. Hal ini didukung dengan penilaian responden sebesar 95,08% yang menyatakan bahwa LKPD telah ditinjau oleh Inspektorat dan diaudit oleh BPK.

Hasil pembahasan tersebut dalam studi ini menyatakan bahwa kedelapan indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain didukung hasil analisis jawaban responden mengenai kedelapan indikator yang terdapat dalam variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan, penelitian ini juga dapat didukung dari segi karakteristik responden. Berdasarkan usia responden, dapat dilihat bahwa didominasi pada usia yang matang dengan tingkat emosi yang lebih stabil serta dewasa dan handal dalam menjalankan tugas, yaitu berusia 41-50 tahun. Pada Tabel 2, terlihat persentase yang juga cukup tinggi, yaitu berusia 31-40 tahun. Hal tersebut mellihatkan bahwa berdasarkan usia

responden tingkat pemahaman terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang pegawainya memiliki usia matang dengan tingkat emosi yang lebih stabil serta andal mampu memudahkan tujuan organisasi, yaitu dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan jenjang pendidikan, pendidikan yang mendominasi adalah S1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan pijakan untuk mengembangkan diri serta memberikan keleluasan untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekitarnya demi kelancaran tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sudah baik untuk tercapainya tujuan organisasi, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan masa kerja sebagai pengelola keuangan daerah, persentase yang cukup tinggi, yaitu di atas 10 tahun. Hal tersebut erat kaitannya dengan produktivitas kerja seseorang. Seseorang dengan masa kerja yang lebih lama memiliki pengalaman kerja lebih banyak dan luas, kepercayaan diri yang tinggi, serta keterampilan teknis dan pemahaman yang lebih baik atas bidang pekerjaannya sehingga dapat berkinerja produktif untuk mencapai tujuan (Suprihastini et al., 2017). Hal ini terlihat bahwa masa kerja diatas 10 tahun akan membuat seseorang memiliki pengalaman kerja yang banyak dan cenderung memiliki kemampuan yang baik dari sisi kualitas dan penyelesaian tugas yang tepat waktu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dihasilkan dengan optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Pengalaman kerja, kepercayaan diri, dan keterampilan teknis dalam mengelola keuangan daerah dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil studi ini konsisten dengan penelitian Hasanah et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan, tata kelola pemerintahan juga semakin baik.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan uraian pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ketiga, transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang

baik. Keempat, akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Implikasi penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam mengelola keuangan daerah pada masing-masing OPD. Kompetensi pegawai yang bekerja sebagai pengelola keuangan perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, karyawan perlu ditempatkan pada bidangnya masing-masing.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, perlu dikembangkan lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil empiris lebih kuat, yaitu dengan menambah variabel lainnya yang dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik. Variabel tersebut, yaitu peran auditor internal, temuan audit, sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan, disiplin kerja, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Kedua, pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner sehingga disarankan untuk dilakukan wawancara dan observasi guna memperkuat hasil dari kuesioner tersebut untuk penelitian selanjutnya. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan satu kabupaten sebagai objek penelitian dan disarankan untuk menambah jumlah objek penelitian pada penelitian selanjutnya, misalnya dua kabupaten atau satu provinsi agar memperkuat hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, T. E., Sugianto, L. O., & Wardhani, D. P. (2022). The effect of good governance on regional financial management transparency in ponorogo regional working units. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 2568–2595. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4327>
- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap implementasi good governance serta implikasinya pada pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di kabupaten tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.31000/jmb.v8i1.1572>
- Arifin, M. N., Handajani, L., & Alamsyah. (2016). Kualitas laporan keuangan dan kepercayaan stakeholder (studi pada satuan kerja wilayah kerja KPPN mataram). *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 4(2), 121–144. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i2.2785>
- Astrawan, K. P., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2016). Pengaruh sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern dan pengawasan keuangan pemerintah daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD kabupaten buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 6(3).
- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and transparency in financial management of village fund allocations in achieving good governance. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230–245. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.824>



- Ghazali, R., Ahmad, M. N., & Zakaria, N. H. (2015). The mediating role of knowledge integration in effect of leadership styles on enterprise systems success: The post-implementation stage. *Journal of Enterprise Information Management*, 28(4), 531–555. <https://doi.org/10.1108/JEIM-08-2014-0083>
- Haeli. (2020). Penerapan prinsip-prinsip good governance pada pemerintah daerah provinsi nusa tenggara barat (studi kasus). *Jurnal Bestari*, 1, 1–9.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada pemerintah desa di kecamatan cibeureum kabupaten kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Herawati, E., Malisan, L., & Kusumawardani, A. (2016). Pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1(1), 12–19. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/issue/view/55>
- Hildan, A. (2015). Good governance sebagai intervening pada pengaruh pengendalin intern dan audit manajemen terhadap kinerja BPJS ketenagakerjaan kanwil jawa timur. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 5(6), 201–208.
- Karpowitz, C., Monson, Q., & Preece, J. (2017). How to elect more women: gender and candidate success in a field experiment. *American Journal of Political Science*, 61(4), 927–943. <https://doi.org/10.1111/ajps.12300>
- Kurniasari, W. (2016). Analisis implementasi reformasi birokrasi dalam merealisasikan good governance dan pencapaian target millenium development goals (studi kasus pada pemerintah kota yogyakarta). *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 67–78. <https://doi.org/10.24964/ja.v4i1.128>
- Lestari, U. P. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, good governance terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 43–53. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i2.7796>
- Limbong, I., Suhendra, & Hidayati, S. (2019). Pengaruh gaya kepemimpinan transformatif, kompetensi sumber daya manusia, dan disiplin kerja terhadap penerapan good government governance (studi kasus: Pada pegawai biro organisasi dan tata laksana di kementerian agama RI). *Repository UIN Syarif Hidayatullah*, 49–58.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 2(1), 152–170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Pertiwi, T. (2016). *Pengaruh good corporate governance (GCG) dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi (studi kasus pada rumah sakit panti rini yogyakarta)*.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, 4(2), 14–28. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Putera, A. D. (2018). *Sri mulyani: banyak laporan keuangan daerah WTP, tapi kepala daerahnya korupsi*. Kompas.Com.
- Sanjaya, A., Rasuli, M., & Haryani, E. (2017). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sumber daya manusia terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *JOM Fekon*, 4(1).

- Sari, I. M., & Tamrin, N. A. (2014). Pengaruh penerapan good government governance dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan (studi pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 106–121.
- Setiowati, P. P., Herwanti, R. T., & Surati, S. (2017). Determinant of good government governance implementations and its implications for local government performance. *E-Proceeding STIE Mandala*.
- Suprihastini, E., Akram, & Santoso, B. (2017). Effect of regional financial accounting system, internal control systems and regional financial audit on financial accountability of local government. *E-Proceeding STIE Mandala*.
- Syarion, F., Zirman, & Azhari. (2015). Pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap penerapan good governance (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kota solok). *Jom FEKON*, 2(2), 1–14.
- Vidyasari, F. N. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4). <https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1658>
- Yusniyar, Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengendalian intern terhadap good governance dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan (studi pada SKPA pemerintah aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(2), 100–115.